

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kebutuhan mengelola keuangan oleh suatu negara dapat merasakan betapa penting bagian fungsi dan tugas perbendaharaan suatu negara untuk mengelola sumber-sumber keuangan pemerintah dimana dibatasi dengan secara efisiensi. meliputi perencanaan kas dengan baik serta pencegahan supaya tidak mengalami kebocoran maupaun penyimpangan. Perubahan pada paradigma dibidang politik, ekonomi serta pemerintahan, maupun berbagai dinamika perubahan yang terus berkembang di masyarakat, serta menuntut penyelenggaraan negara terutama pada hal pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib, transparan dan akuntabel serta terbebas dari kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Meningkatnya kinerja serta profesionalisme birokrasi dapat dijadikan suatu hal yang tak bisa ditunda. Kemudian meningkatnya transparansi serta clean government adalah usaha penting yang harus dilaksanakan. Reformasi ini dapat memaknai bahwa penyempurnaan secara dinamis dan terus menerus untuk meningkatnya suatu kinerja birokrasi sehingga dalam pelayanannya akan menjadi lebih baik. Diamanatkan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

(www.dirjenperbendaharaan.go.id)

Rizky Lahmudin Abdjul, 2020

SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Diploma Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Telah dilakukannya pembenahan organisasi keuangan yang sesuai atas kepentingan rakyat, berkembangnya suatu strategi keuangan negara, serta dinamika administrasi publik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penataan serta pembentukan kelembagaan yang lebih teratur maupun pro pada publik diharapkan dapat menyerahkan bantuan serta panduan bagi rakyat dan Negara yang lebih rasional maupun adil. Dibentuknya pembenahan organisasi keuangan oleh Kementerian Keuangan dari tahun 2002 dapat berjalan sampai saat ini. Pembentukan organisasi keuangan ini tersebut terdiri dari pemisahan, penggabungan serta penajaman fungsi, maupun modernisasi.

Penekanan tugas serta fungsi yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Badan Kebijakan Fiskal. Modernisasi diimplementasikan dalam pembentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KPU DJBC), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dilakukannya penajaman serta pemisahan fungsi organisasi sangat diharapkan dapat menciptakan struktur organisasi yang dalam menghasilkannya prosedur yang berkualitas serta dapat diberikan bantuan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.

Pencairan Dana merupakan suatu kegiatan mengeluarkan, merealisasikan, atau tindakan yang menguangkan serta memperbolehkan mencairkan dana berupa uang tunai yang telah disediakan untuk suatu alasan keperluan tertentu. Pencairan dana pada Kementerian Pertanian memakai dua proses yaitu proses pencairan dana langsung serta proses pencairan dana dengan uang persediaan. Dalam sistem pencairan dana langsung dapat digunakan dalam belanja untuk keperluan pegawai dan belanja untuk keperluan non pegawai. Proses pencairan ini hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu satu hari, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses diterbitkannya SP2D oleh KPPN wajib dilaksanakan kurang lebih 1 hari kerja sesudah SPM tersebut diterima dengan lengkap. Proses Pencairan Dana merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Rizky Lahmudin Abdjul, 2020

SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Diploma Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Belanja Negara (APBN). Tanpa proses tersebut, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sebatas angka yang tidak berdampak apapun dalam pembangunan dan perekonomian. Dengan percepatan proses pencairan dana tersebut dapat memberikan tingginya aktivitas pemerintah dalam penyediaan fasilitas fisik serta non fisik kepada kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan dana langsung adalah faktor yang dapat dikatakan sangat penting saat menjalankan tugas pada bagian keuangan, oleh sebab itu penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada Bagian keuangan dan Perlengkapan khususnya di Sub-bagian Perbendaharaan pada BPPSDMP tertarik dalam pengambilan judul yaitu **“SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.”**

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memiliki tujuan umum yaitu dapat memahami lebih dalam mengenai Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dimulai dari pembagian dokumen-dokumen sampai proses yang sudah dilaksanakan bagi BPPSDMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2.2 Tujuan Khusus

Sebagai penulis tujuan khusus yang dapat dicapai yaitu sebagai ketentuan kelulusan D3 Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta dapat mengenalkan mahasiswa-mahasiswa dalam dunia kerja maka oleh karena itu dapat membantu meningkatkan kompetensi dalam dunia kerja kepada mahasiswa sesuai dalam bidang jurusan masing-masing.

Rizky Lahmudin Abdjul, 2020

SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Diploma Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.3 Manfaat

1.3.1 Secara Teoritis

- a. Tinjauan tersebut mampu diharapkan menambah memperluas wawasan dalam dunia kerja, bertambahnya ilmu pengetahuan tentang dunia kerja, dan pengalaman pada bidang studi yang dapat dibahas pada tinjauan kali ini, khususnya tentang Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS).
- b. Penulis dapat mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan sistem dan prosedur pencairan dana langsung (LS)

1.3.2 Secara Praktis

- a. Sebagai penulis sangat mengharapkan hasil dari tugas akhir ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mahasiswa mengenai sistem dan prosedur pencairan dana langsung
- b. Dapat bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nantinya akan dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Sebagai sarana yang dapat mengembangkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada masa yang akan datang.

Rizky Lahmudin Abdjul, 2020

SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS) PADA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Diploma Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]